

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan tentang Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

- **Dasar Hukum :**

Pasal 18 ayat (6) Undangn-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 33 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 48 Tahun 2017; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB yaitu:
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RKPD SEBAGAI PEDOMAN RENJA PERANGKAT DAERAH
BAB III SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN RKPD
BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BAB V PERUBAHAN RKPD
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
- Ditetapkannya RKPD Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik pusat,

provinsi maupun kota, sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya yang tersedia.

- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Juli 2022.
- Lampiran : -